

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

TIM BERACARA DALAM PERSIDANGAN MEWAKILI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses beracara pada gugatan yang melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pihak dalam persidangan diperlukan tim beracara;
 - b. bahwa pelaksanaan tugas beracara dalam persidangan untuk bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan tugas tambahan Subbagian Hukum di luar dari tugas dan fungsinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM BERACARA DALAM PERSIDANGAN MEWAKILI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Kuasa Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menangani dan menyelesaikan Perkara dalam persidangan;
- b. menghadap di muka Pengadilan;
- c. menghadiri seluruh acara persidangan;
- d. menghadap Ketua Pengadilan, Majelis Hakim, Panitera dan pihak-pihak lain;
- e. menerima dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan atau bersangkutan dengan perkara, memberikan keterangan/penjelasan, mengadakan perdamaian;
- f. membuat, menandatangani, mengesahkan dan mengajukan: eksepsi, segala permohonan, surat jawaban, gugatan rekonvensi, duplik, replik rekonvensi, bukti-bukti, kesimpulan, risalah banding dan memori/kontra memori banding, risalah kasasi, memori/kontra memori kasasi, segala rekes-rekes dan lain-lain surat yang diperlukan;
- g. mengajukan saksi/ahli, mengajukan pertanyaan kepada saksi/ahli, mengajukan dan mempelajari bukti-bukti;
- h. menolak saksi/ahli atau bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak lain;
- i. menyatakan banding, menyatakan kasasi dan meminta perkara agar diperiksa kembali dengan peninjauan kembali;
- j. mengambil segala tindakan jaminan, membuat dan menyuruh menjalankan segala perintah juru sita, pemberitahuan, panggilan-panggilan dan menghadiri pemberitahuan/teguran-teguran dari Pengadilan-pengadilan dan lain-lain;

- k. mengajukan atau mempertimbangkan usul penyelesaian perkara secara damai; dan
- l. melakukan segala tindakan yang dianggap penting dan berguna selaku Kuasa Hukum.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Kepada pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan pelaksanaan persidangan dan/atau pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam diktum KEDUA.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM BERACARA
DALAM PERSIDANGAN
MEWAKILI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TANGGAL : 13 Maret 2018

SUSUNAN TIM BERACARA DALAM PERSIDANGAN
MEWAKILI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1.	Dr. Salusra Widya, M.A. NIP. 19610509 198812 1 001	Sekretaris Utama	Sekretariat Utama
2.	Dr. Robin Asad Suryo, M.A. NIP. 19650809 199003 1 001	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
3.	Sarah Sadiqa S.H., M.Sc. NIP. 19700118 199603 2 002	Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	Kedeputian Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
4.	Ir. Dharma Nursani, M.Sc., Ph.D. NIP. 19580307 198603 1 001	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan
5.	Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP. NIP. 19610408 199403 1 002	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
6.	R. Fendy Dharma Saputra, S.H., LL.M. NIP. 19660529 199201 1 001	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
7.	Setya Budi Arijanta, S.H., KN. NIP. 19701231 199503 1 001	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
8.	Ir. Sutan Suangkupon Lubis, M.Sc. NIP. 19640323 199203 1 005	Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
9.	Andi Susanto, S.STP., M.Sc. NIP. 19790513 199711 1 001	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
10.	Eko Rinaldo Octavianus, S.E, M.E. NIP. 19691014 199603 1 001	Kepala Subdirektorat Riset dan Kontrak	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
11.	Rinaldi Morintosh, S.H., M.Kn NIP. 19810509 201012 1 001	Kepala Subbagian Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian

12.	Mustika Rosalina Putri, S.H., M.H. NIP. 19841121 201012 2 001	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi LPSE Nasional	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
13.	Inamawati Mastuti Dewi, S.H. NIP. 19900814 201402 2 001	Pranata Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
14.	Ichwan Fajar Harika, S.H. NIP. 19830310 201402 1 001	Calon Perancang Peraturan Perundang- Undangan	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
15.	Muhammad Qadr Siddiq Zam, SH. NIP. 19840621 201402 1 001	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
16.	Dian Arsita Wardhani, S.H. NIP. 19840823 201502 2 001	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggha Wilayah I
17.	Febri Kamalisa Rachman, S.H., M.H. NIP. 19840208 201502 2 001	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
18.	Ardian Hoppin Sitompul, S.H. NIP. 19880522 201502 1 001	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
19.	Rasmita Juliana Sitepu, S.H., M.Kn NIP. 19880709 201502 2 001	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
20.	Benny Leopold Dumais, S.H. NIP. 19890530 201502 1 001	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
21.	Mahatmya Widiasari, S.H.	Staf Bagian Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO